

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Geografis

1. Keadaan Alam dan Luas Wilayah

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2012 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	Kode	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	%
1	11.01	Kabupaten Aceh Selatan	3,841.60	6.629%
2	11.02	Kabupaten Aceh Tenggara	4,231.43	7.301%
3	11.03	Kabupaten Aceh Timur	6,286.0	10.846%
4	11.04	Kabupaten Aceh Tengah	4,318.39	7.451%
5	11.05	Kabupaten Aceh Barat	2,927.95	5.052%
6	11.06	Kabupaten Aceh Besar	2,969.00	5.123%
7	11.07	Kabupaten Pidie	3,086.95	5.326%
8	11.18	Kabupaten Aceh Utara	3,236.86	5.585%
9	11.09	Kabupaten Simeulu	2,051.48	3.540%
10	11.10	Kabupaten Aceh Singkil	2,185.00	3.770%
11	11.11	Kabupaten Bireuen	1,901.20	3.280%
12	11.12	Kabupaten Aceh Barat Daya	1,490.60	2.572%
13	11.13	Kabupaten Gayo Lues	5,719.58	9.869%
14	11.14	Kabupaten Aceh Jaya	3,812.99	6.579%
15	11.15	Kabupaten Nagan Raya	3,363.72	5.804%
16	11.16	Kabupaten Aceh Tamiang	1,956.72	3.376%
17	11.17	Kabupaten Bener Meriah	1,454.09	2.509%
18	11.18	Kabupaten Pidie Jaya	1,073.60	1.853%
19	11.71	Kota Banda Aceh	61.36	0.106%
20	11.71	Kota Sabang	153.00	0.264%
21	11.73	Kota Lhokseumawe	181.06	0.312%

22	11.74	Kota Langsa	262.41	0.453%
23	11.75	Kota Subulussalam	1,391.00	2.400%

2. Iklim

Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis khatulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata 26,9 °C, suhu udara maksimum mencapai 32,5 °C dan minimum 22,9 °C. Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70 dan 80 persen. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari massa udara daratan Asia dan Samudera Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi berkisar antara 1.500-2.500 mm per tahun.

3. Topografi

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah, Provinsi Aceh yang memiliki topografi

datar (0 – 2%) tersebar disepanjang pantai barat-selatan dan pantai utara-timur sebesar 24.83% dari total wilayah, landai (2 – 15%) tersebar diantara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, dibagian pantai barat-selatan dan pantai utara-timur sebesar 11,29% dari total wilayah; agal curam (15 – 40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) yang merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Lauser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah.

Provinsi Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m diatas permukaan laut. Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) Daerah berketinggian 0-25 m dpl merupakan 22,62 persen luas wilayah (1,283,887.27 ha), (2) Daerah berketinggian 25-1.000 m dpl sebesar 54,22 persen luas wilayah (3,077,445.87 ha), dan (3) Daerah berketinggian diatas 1.000 m dpl sebesar 23,16 persen luas wilayah (1,314,526.86 ha).

4. Demografi

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2009 adalah 4.363.477 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Laju pertumbuhan penduduk Aceh selama 5 tahun (2006- 2009) terakhir sebesar 1,66 persen. Kota Sabang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh yakni sebesar 0,10 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Jaya yakni sebesar 7,90 persen. Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah

Kabupaten Aceh Utara (532.535 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (29.184 jiwa).

5. Penggunaan Lahan

Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar dan 2 buah danau. Karakteristik lahan di Provinsi Aceh pada tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan luas 3.523.817 Ha atau 61,42 persen. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 691.102 Ha atau 12,06 persen dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah seluas 311.872 Ha atau 5,43 persen dan pertanian tanah kering semusim mencapai 137.672 Ha atau 2,4 persen dan selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan, perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya dibawah 5,99 persen.

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Secara umum, penetapan Wilayah Pengembangan (WP) di Aceh dikelompokkan berdasarkan posisi geografis, yaitu: (1) Banda Aceh dan sekitar, (2) Pesisir Timur, (3) Pegunungan Tengah, dan (4) Pesisir Barat. Wilayah Pengembangan yang dimaksud memiliki beberapa pusat kegiatan di wilayah tersebut yang dapat merupakan: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan PKN dan PKW

merupakan kewenangan pemerintah, dan telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sementara PKL ditetapkan dalam RTRW Provinsi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2008 tentang RTRWN. Penetapan wilayah pengembangan berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Aceh.

7. Wilayah Rawan Bencana

Potensi ancaman bencana di Aceh tidak akan berkurang secara signifikan dalam tahun-tahun ke depan. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Aceh maka diperlukan suatu upaya menyeluruh dalam upaya penanggulangan bencana, baik ketika bencana itu terjadi, sudah terjadi, maupun potensi bencana di masa yang akan datang. Konsekuensi dari kondisi geomorfologis dan klimatologis serta demografis, maka ancaman bahaya (hazard) di Aceh mencakup ancaman geologis, hidro-meteorologis, serta sosial dan kesehatan.

Secara geologis, Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera (sumatera fault/transform) yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda yang dikenal dengan Patahan Semangko. Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh adalah wilayah bagian tengah, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Hal ini dapat menyebabkan Aceh mengalami bencana geologis yang cukup panjang.

Berdasarkan catatan bencana geologis, tsunami pernah terjadi pada tahun 1797, 1891, 1907 dan tanggal 26 Desember tahun 2004 adalah catatan kejadian ekstrim terakhir yang menimbulkan begitu banyak korban jiwa dan harta. Kawasan dengan potensi rawan tsunami yaitu di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh yang berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami tsunami seperti Samudera Hindia di sebelah barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue), perairan Laut Andaman di sebelah utara (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang), dan perairan Selat Malaka di sebelah utara dan timur (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang).

B. Sosial Ekonomi dan Kependudukan

1. Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk, angkatan kerja, penduduk berkerja, dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat.

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2012 mencapai 3.202.964 jiwa lebih besar dari tahun 2008, dengan jumlah angkatan kerja paling banyak terdapat di kabupaten Aceh Utara dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 225.482 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 149.042 jiwa.

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar masih merupakan tamatan pendidikan dasar mencapai 35,98 persen dan menengah (SMP dan SMA) mencapai sekitar 52 persen. Sementara untuk tamatan pendidikan tinggi (Universitas dan Akademi) tidak sampai 10 persen dari total penduduk usia kerja. Sementara berdasarkan tipe daerah, sebagian besar penduduk usia kerja terdapat di pedesaan, yaitu sekitar 71,88 persen.

Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Aceh tahun 2013 (februari) mencapai 2.121 ribu jiwa atau sekitar 1,75 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 1.944 ribu jiwa penduduk bekerja dan 177,8 ribu jiwa pengangguran terbuka. Angkatan kerja tahun 2012, terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu mencapai 231.818 jiwa dan terendah di Kota Sabang sebanyak 12.409 jiwa.

Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Aceh pada tahun 2013 (februari), mencapai 1.944 ribu jiwa, atau meningkat sebanyak 321.692 jiwa dari tahun 2008. Persebaran penduduk bekerja di Provinsi Aceh lebih banyak tersedia di daerah pedesaan dibandingkan di perkotaan, dan sebagian besar penduduk bekerja masih di sector pertanian (48,86%) dan sector jasa (19,67%). Sementara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah dasar dan menengah. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja terbesar di Kabupaten Aceh Utara yaitu mencapai 211.686 jiwa.

Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh pada tahun 2013 (februari) mencapai 177.800 jiwa, meningkat sebanyak 6.388 jiwa dari tahun 2008.

Sementara kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Aceh tergolong masih tinggi dibandingkan terhadap tingkat pengangguran nasional, pada tahun 2013 tercatat TPT sekitar 8,38 persen. Sementara untuk perkembangan TPT tahun 2012 tertinggi yaitu di Kabupaten Aceh Utara mencapai sebesar 15,47% dan terendah 1,41% di kabupaten Bener Meriah. (Sakernas, BPS 2012).

2. Kondisi Pendidikan

Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Aceh menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011, Angka Melek Huruf mencapai 96,95% berada di atas rata-rata nasional. Sementara untuk perbandingan sementara untuk AMH mencapai 96,95 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Lhokeumawe (99,64%) dan terendah di Kabupaten GAYo Lues (87,38%) (BPS, 2010).

3. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk anatr provinsi di wilayah Aceh selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.

Angka Kematian Balita (AKB), menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB menunjukkan perbaikan dalam lima

tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010 sebesar 25,5 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi AKB Provinsi Aceh masih tergolong tinggi dan berada di atas rata-rata AKB nasional.

Status Gizi Balita, kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi balita, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang sejak usia dini (4 bulan) yang ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia balita. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil. Perkembangan status gizi balita untuk persentase balita gizi buru/kurang menurun pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2007, namun masih tinggi dibandingkan nasional.

Angka Harapan Hidup (AHH), perkembangan AHH Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. AHH Provinsi Aceh tahun 2011 mencapai 68,60 tahun masih rendah dibandingkan terhadap AHH nasional. Sementara untuk perbandingan AHH antar kabupaten/kota tahun 2011 di Provinsi Aceh, AHH tertinggi berada di kabupaten Bireuen sebesar 72,39 tahun lebih tinggi dari AHH provinsi dan nasional dan terendah di Kabupaten Simeulu (63,05 tahun). (BPS, 2011).

4. Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2004-2013, secara absolut penurunan sebesar 118,99 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebanyak 841 ribu jiwa. Seperti halnya dengan

kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 17,6 persen. Kondisi kemiskinan Provinsi Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37).

5. Perkembangan IPM

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2004-2011 membaik, IPM Provinsi Aceh tahun 2011 mencapai 72,16 masih dibawah rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking IPM Provinsi Aceh 2011 menduduki peringkat ke 18 secara nasional setelah Jawa Timur dan peringkat ke 9 di Pulau Sumatera setelah Jambi. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Banda Aceh dan menduduk peringkat ke-22 secara nasional, dan IPM terendah adalah Kabupaten Gayo Lues yaitu 67,86 dan berada diperingkat ke-411 secara nasional. (BPS, 2011).

C. Perekonomian Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Aceh menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB) dengan migas tahun 2012 mencapai 96,161 miliar rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi Aceh menyumbang sebesar 1,43% terhadap PDB nasional (33 provinsi). Sementara untuk PDRB ADHK tahun 2000 dengan migas sebesar 36.600 miliar rupiah, sementara tanpa migas sebesar 32.677 miliar rupiah.